

Pengaruh Faktor Fiskal, Demografi, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2018–2025

Siti Nurhasanah¹, Heru Wahyudi², Vitriyani Tri Purwaningsih³, Marselina⁴, Prayudha Ananta⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 31, 2026
Revised Juli 31, 2026
Accepted Juli 31, 2026

Kata Kunci:

Kemandirian Fiskal,
Pendapatan Asli Daerah,
Dana Bagi Hasil,
Produk Domestik Regional
Bruto,
Anti Korupsi

Keywords:

*Fiscal Independence,
Regional Original Revenue,
Revenue Sharing Funds,
Gross Regional Domestic
Product,
Anti-Corruption*

ABSTRAK

Kemandirian fiskal merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal karena menggambarkan kapasitas pemerintah daerah membiayai fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri. Namun, tingkat kemandirian fiskal pemerintah antar provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera masih menunjukkan perbedaan yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, aktivitas ekonomi, karakteristik demografis, dan tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan anti korupsi terhadap tingkat kemandirian fiskal tingkat pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel pada 16 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, sedangkan DBH berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, anti korupsi yang diproses menggunakan Monitoring Center for Prevention (MCP) berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal lebih ditentukan oleh optimalisasi potensi ekonomi dan pendapatan asli daerah dibandingkan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

ABSTRACT

Fiscal independence is an important indicator of the successful implementation of fiscal decentralization, as it reflects the degree of regional governments to finance public administration independently. However, the level of fiscal independence among provincial governments in Java and Sumatra varies due to differences in fiscal capacity, economic activity, demographic characteristics, and governance quality. This study aims to examine the effects of Regional Original Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), population, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and anti-corruption on the fiscal independence of provincial governments in Java and Sumatra during 2018–2025. A quantitative approach was employed using panel data regression on 16 provinces. The results indicate that PAD, population, and GRDP have a positive and significant effect on fiscal independence, while DBH has a negative and significant effect. Meanwhile, anti-corruption, measured by the Monitoring Center for Prevention (MCP), has a negative but insignificant effect. These findings suggest that fiscal independence is primarily driven by the optimization of regional economic potential and local revenue rather than dependence on central government transfers.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

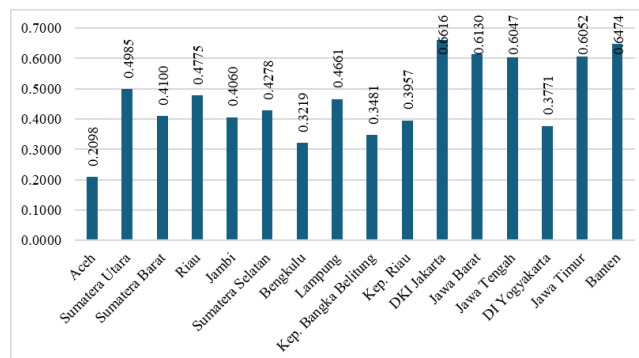


Corresponding Author:

Siti Nurhasanah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
Lampung, Indonesia
Email: sitinurh3333@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi dari suatu daerah tercermin pada tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Konsep ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah mendanai kebutuhan belanja daerah melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan pada transfer pemerintah pusat [1]. Daerah yang sudah mandiri secara fiskal, memiliki fleksibilitas lebih besar dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat [2], serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik tanpa tergantung dana tranfer pemerintah pusat [3]. Meskipun desentralisasi fiskal telah diterapkan lebih dari dua dekade, tingkat kemandirian fiskal antardaerah masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan desentralisasi fiskal belum tercapai secara merata. Berikut gambaran kemandirian fiksal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2018-2025.



Gambar 1. Rata-rata Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera per Tahun 2018-2025.

Berdasarkan Gambar 1, masih terdapat kesenjangan kemandirian fiskal antarprovinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Kondisi ini menggambarkan jika sebagian daerah telah mampu membiayai kebutuhannya melalui kapasitas fiskal yang dimiliki, sedangkan daerah lainnya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Hal tersebut merefleksikan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi hambatan dalam mencapai daerah yang mandiri secara fiskal. Kesuksesan pelaksanaan desentralisasi fiskal juga ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi penerimaan dengan optimal [4].

Struktur ekonomi di Pulau Jawa telah berkembang ke arah sektor industri dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi [5], sedangkan Pulau Sumatera mulai bertransisi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier [6]. Perbedaan struktur ekonomi tersebut mencerminkan variasi potensi penerimaan daerah yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah meningkatkan PAD. Sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, dinamika kemandirian fiskal di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi penting untuk dikaji. Menurut Sayadi [7] juga menemukan adanya perbedaan kinerja keuangan,

khususnya realisasi PAD, yang menunjukkan kapasitas fiskal dan tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih bervariasi antardaerah.

Selain PAD, kapasitas fiskal daerah juga dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun DBH bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah, peningkatan kemandirian fiskal tetap bergantung pada kemampuan daerah mengoptimalkan pendapatan sendiri [8]. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh DBH terhadap kemandirian fiskal masih menunjukkan temuan yang berbeda. Andrianda & Rosada (2024) [9] serta Khairani & Mustika (2026) [10] menemukan bahwa DBH berpengaruh negatif signifikan, sedangkan Falia dkk. (2025) [11] dan Nur Istiqomah & Marpaung (2026) [12] menunjukkan pengaruh positif signifikan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan empiris sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh DBH terhadap kemandirian fiskal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025.

Selain faktor fiskal, kemandirian fiskal juga dipengaruhi oleh faktor demografis, salah satunya jumlah penduduk. Jumlah penduduk berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan potensi penerimaan daerah [13]. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga diikuti oleh meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik [14]. Dengan demikian, jumlah penduduk tidak hanya mencerminkan potensi peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga besarnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah daerah [15]. Penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang berbeda, bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah [16] dan juga menemukan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal [17]. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk tidak selalu disertai dengan peningkatan kapasitas keuangan regional.

Selain faktor demografis, kemandirian fiskal juga dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dihasilkan dalam suatu periode [18]. Semakin tinggi PDRB, semakin besar aktivitas ekonomi yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi [19]. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, otonomi fiskal juga cenderung meningkat dengan begitu pertumbuhan ekonomi mengindikasikan daerah dapat mandiri dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka [20]. Penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal maupun kemandirian keuangan daerah [21][22][23][24].

Selain PDRB, tata kelola juga diduga memengaruhi kemandirian fiskal daerah. Tata kelola yang baik mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dan efektivitas penggunaan anggaran [25]. Untuk mencegah praktik korupsi, pemerintah menerapkan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) sejak 2018 sebagai instrumen pengawasan. Lemahnya pengawasan dalam desentralisasi fiskal berpotensi meningkatkan korupsi dan inefisiensi anggaran [26]. Namun, hasil penelitian terdahulu masih beragam. Sukmadilaga dkk. (2024) [27] menemukan bahwa implementasi MCP berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal, sedangkan Yang dkk. (2024) [28] menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola bergantung pada tingkat transparansi dan efektivitas upaya pencegahan korupsi di masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan anti korupsi terhadap kemandirian fiskal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kajian desentralisasi fiskal sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi lembaga resmi pemerintah. Data yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemandirian fiskal, dan anti korupsi periode 2018–2025. Seluruh data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga memiliki validitas yang memadai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda untuk melihat bagaimana variabel-variabel yang diteliti saling memengaruhi. Untuk menstabilkan varians dan mengurangi masalah dalam uji asumsi klasik digunakan transformasi ke bentuk logaritma untuk data yang berbentuk nominal.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

$$IKF = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} - \beta_2 \ln DBH_{it} + \beta_3 \ln JP_{it} + \beta_4 \ln PDRB_{it} + \beta_5 AK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

IKF	= Indeks Kemandirian Fiskal	(Indeks)
PAD	= Log Pendapatan Asli Daerah	(Rasio)
DBH	= Log Dana Bagi Hasil	(Rasio)
JP	= Log Jumlah Penduduk	(Rasio)
PDRB	= Log Produk Domestik Regional Bruto	(Rasio)
AK	= Anti Korupsi	(Persen)
i	= Banyaknya Provinsi	
t	= Periode Tahun	
β_0	= Konstanta	
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	= Koefisien Regresi	
ε	= Error Term	

Berikut merupakan hipotesis pada penelitian ini:

- 1) Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal pada provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 2) Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal pada provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 3) Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal pada provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 4) Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal pada provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.
- 5) Diduga anti korupsi berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal pada provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Pemilihan Model

3.1.1 Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	52.2415	(-15,107)	0.0000
Cross-section Chi-square	271.244	15	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data

Dari hasil uji *chow* menunjukkan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Sehingga, model yang terpilih adalah model FEM, selanjutnya dilakukan uji *hausman*.

3.1.2 Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

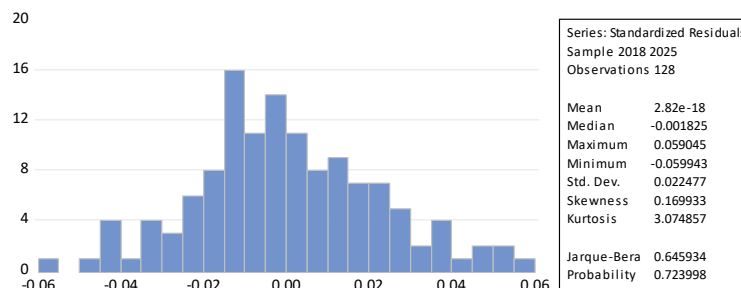
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	61.9161	5	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Dari hasil uji *hausman* di atas diperoleh probabilitas $0,0000 < 0,05$. Sehingga, model yang terpilih adalah FEM.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 0,645934 dengan probabilitas sebesar $0,723998 > 0,05$. Dari hasil tersebut maka H_0 diterima sehingga dapat diartikan jika residual terdistribusi normal.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PAD	0.00047	7103.415	1.578366
DBH	5.71E-05	508.852	1.024899
JP	0.01285	220618.3	1.784433
PDRB	0.00058	15161.94	2.613425
AK	2.28E-08	31.6666	1.56181

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3, *Centered VIF* menunjukkan hasil di bawah < 10 , dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

3.2.3 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.028983	0.436845	0.066346	0.9472
PAD	0.004238	0.010807	0.392116	0.6958
DBH	0.000589	0.003759	0.15669	0.8758
JP	0.030493	0.056378	0.540867	0.5897
PDRB	-0.03052	0.011956	-2.55285	0.0121
AK	0.000179	7.51E-05	2.389742	0.0186

Sumber: Hasil Olah Data (2026),

Hasil uji heteroskedastisitas metode Glejser pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel PDRB (0,0121) dan anti korupsi (0,0186) memiliki nilai probabilitas $< 0,05$ sehingga model terindikasi mengalami heteroskedastisitas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *White Cross-section (Period Cluster)* untuk menghasilkan robust standard errors, sehingga hasil uji statistik tetap valid meskipun terdapat pelanggaran asumsi homoskedastisitas [29].

3.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	0.466891
S.D. dependent var	0.136882
Akaike info criterion	-4.43239
Schwarz criterion	-3.96448
Hannan-Quinn criter.	-4.24227
Durbin-Watson stat	1.771483

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 5, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,771483. Nilai tersebut lebih mendekati angka 2 dibandingkan angka 0, sehingga model dalam penelitian aman dari autokorelasi [30][31][32].

3.3 Hasil Estimasi

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.710863	0.531467	-10.74548	0.0000
PAD	0.282550	0.030517	9.25869	0.0000
DBH	-0.031029	0.005069	-6.12136	0.0005
JP	0.344379	0.069758	4.93676	0.0017
PDRB	0.084139	0.031706	2.65378	0.0328
AK	-0.000196	0.000262	-0.74767	0.4790

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

3.4 Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Variable	t-Statistic	t-Tabel	Kesimpulan
PAD	9.258689	1.9796	Tolak H0
DBH	-6.121355	1.9796	Tolak H0
JP	4.936762	1.9796	Tolak H0
PDRB	2.653776	1.9796	Tolak H0
AK	-0.747670	1.9796	Terima H0

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan hasil uji t, nilai t-statistik PAD, jumlah penduduk, dan PDRB, serta nilai absolut|t| t-statistik DBH, lebih besar daripada t-tabel. Dengan demikian, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Sebaliknya, nilai absolut|t| t-statistik anti korupsi lebih kecil daripada t-tabel, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal.

3.5 Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

<i>Df</i> (k-1 ; n-k)	F-Statistik	F-Tabel	Kesimpulan
6 ; 122	193.0667	2.173733	Tolak H ₀

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Berdasarkan hasil uji F, nilai F-Statistik > F-Tabel, sehingga model regresi mampu menjelaskan secara signifikan variasi Kemandirian Fiskal Daerah.

3.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Koefisien Determinasi

R-squared	0.973037
Adjusted R-squared	0.967997

Sumber: Hasil Olah Data (2026)

Diperoleh Adjusted R-Squared di Pulau Jawa 0,967997 yang menunjukkan bahwa variabel indenpenden mampu menjelaskan 96,79% variasi Kemandirian Fiskal pada 16 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2015-2025.

3.7 Pembahasan

3.7.1 Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian pada 16 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kemandirian fiskal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD, maka kemampuan daerah juga meningkat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi. Hal tersebut sejalan dengan temuan Fitriadi dkk [33], Zakiah [34], dan Sukmadilaga dkk [27] yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal tersebut menunjukkan jika PAD menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Temuan tersebut didukung juga oleh penelitian Sitaresmi & Wahyudi [35] mengonfirmasi jika PAD memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Temuan ini menggambarkan jika daerah dengan PAD yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dalam konsep desentralisasi fiskal Oates [36], kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD menjadi salah satu bentuk keberhasilan desentralisasi fiskal karena menunjukkan adanya kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan publik secara mandiri. Oleh karena itu peningkatan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal.

3.7.2 Dana Bagi Hasil

Temuan penelitian ini, pada 16 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025 mengonfirmasi bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemandirian fiskal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan DBH cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemandirian fiskal daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya dana transfer belum mampu mendorong pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ferdiansyah dan Febrianti [37], Khairani dan Mustika [10], serta temuan Rahayu dkk [38] mengonfirmasi bahwa DBH berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemandirian fiskal. Menurut Ferdiansyah dan Febrianti [37],

peningkatan alokasi DBH justru dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Oates [39], yang menjelaskan bahwa DBH merupakan instrumen transfer fiskal untuk mengurangi *vertical fiscal imbalance* antara pemerintah tingkat pusat dan daerah. Namun, transfer fiskal tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Selain itu, penggunaan DBH, khususnya yang bersumber dari cukai dan sumber daya alam, telah diatur untuk tujuan tertentu sehingga ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas [38]. Oleh karena itu, apabila peningkatan DBH tidak diimbangi dengan optimalisasi PAD dan pengembangan potensi ekonomi daerah, maka kapasitas fiskal daerah cenderung melemah dan tingkat kemandirian fiskal menurun.

3.7.3 Jumlah Penduduk

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025. Temuan ini menggambarkan bahwa seiring bertambahnya jumlah penduduk dapat menjadi potensi dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah apabila dikelola secara optimal. Pertumbuhan penduduk mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi, konsumsi, dan perluasan basis penerimaan daerah sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini sejalan dengan penelitian Aditya Syafri dkk [21], Rahmadan [40], dan Rofiq dan Arza [41] yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Fauzi dkk [42] juga menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas peluang pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates [36], yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola potensi wilayah sesuai karakteristik daerahnya. Dalam konteks ini, jumlah penduduk merupakan salah satu potensi yang dapat memperluas basis penerimaan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, temuan ini juga selaras dengan fungsi alokasi pemerintah, yaitu menyediakan barang dan jasa publik sesuai kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang efektif akan mendorong produktivitas daerah, memperkuat aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas fiskal serta kemandirian fiskal pemerintah daerah.

3.7.4 Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan daerah. Aktivitas ekonomi yang berkembang memperluas peluang penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya [43]. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aditya Syafri dkk. [21], Azzahra Mayraina dan Nurul Badriyah [22], Mudrosanto dan Fajri Ananda [23], serta Rinaldi dan MN' Nuryasman [24] yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

Menurut Rinaldi dan MN' Nuryasman [24], peningkatan aktivitas ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan membayar pajak dan retribusi daerah juga meningkat. Kondisi tersebut memperluas basis penerimaan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Selain itu, daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi umumnya memiliki sektor usaha yang lebih berkembang, produktivitas yang lebih baik, serta peluang investasi yang lebih besar. Dengan demikian, peningkatan PDRB tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

3.7.5 Anti Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anti korupsi yang diproksikan menggunakan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan skor MCP belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Secara teoritis, tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan korupsi belum cukup untuk meningkatkan kapasitas fiskal apabila tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Sukmadilaga dkk [27] yang menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program anti korupsi terhadap kemandirian fiskal dapat berbeda menurut karakteristik daerah dan periode penelitian. Hartanto dan Adnan [44] menjelaskan bahwa skor MCP hanya mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap indikator pencegahan korupsi, bukan efektivitas dalam menekan praktik korupsi. Oleh karena itu, tingginya skor MCP belum tentu diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan maupun penerimaan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal lebih ditentukan oleh kapasitas ekonomi daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dibandingkan keberhasilan program pencegahan korupsi. Dengan demikian, upaya anti korupsi tetap penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi belum cukup untuk meningkatkan kemandirian fiskal tanpa didukung penguatan basis penerimaan daerah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan anti korupsi terhadap kemandirian fiskal pemerintah provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera periode 2018–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, jumlah penduduk, dan PDRB berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kemandirian fiskal, sedangkan DBH berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, anti korupsi yang diproksikan menggunakan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal lebih ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, mengembangkan aktivitas ekonomi, dan memanfaatkan potensi demografis dibandingkan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, implementasi program pencegahan korupsi belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kemandirian fiskal apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi dan optimalisasi penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan kebijakan yang mendorong optimalisasi PAD, pengembangan aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian fiskal.

REFERENSI

- [1] BPK RI, "Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019: Laporan hasil revaluasi atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019," Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Rep., 2020. [Daring]. Tersedia pada: <https://share.google/AngkFhlg0uwoov344>
- [2] T. Dharmawati, W. O. Muhandiana, dan W. Z. O. Aprisilia, "The role of fiscal decentralization in enhancing regional financial independence in Indonesia," *Journal of International*

- Multidisciplinary Research*, 2024. [Daring]. Tersedia pada:
<https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- [3] D. Ahmadi dan Marselina, "Pengaruh kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022," *Economics and Digital Business Review*, vol. 5, no. 2, hal. 627–640, 2024.
- [4] R. W. Bahl dan R. M. Bird, *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries: Development from Below*. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing, 2018.
<https://doi.org/10.4337/9781786435309>
- [5] V. O. Siboro, "Transformasi struktur ekonomi di provinsi di Pulau Jawa," *MABIS*, vol. 14, no. 2, hal. 171–179, Feb. 2023.
- [6] Barika, R. A. Ekaputri, Septriani, dan Efendi, "Analisis struktur ekonomi di Sumatera," *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 4, no. 2, hal. 36–48, Des. 2021.
- [7] M. H. Sayadi, "Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera," *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, vol. 16, no. 2, hal. 96–104, Nov. 2020.
<https://doi.org/10.21067/jem.v16i2.4958>
- [8] S. Nurrahmadani, Hariyati, dan Armiani, "Pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah," *Valid: Jurnal Ilmiah*, vol. 21, no. 2, hal. 162–179, Jul. 2024. <https://doi.org/10.53512/valid.v21i2.385>
- [9] Y. Andrianda dan A. Rosada, "Pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing & Perpajakan (SIKAP)*, vol. 8, no. 2, hal. 168–182, 2024. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v8i2.3206>
- [10] A. Khairani dan N. Mustika, "Pengaruh kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu," *SALAM: Islamic Economics Journal*, vol. 8, no. 2, 2026.
- [11] F. T. Falia, N. Masnila, dan Sarikadarwati, "Pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Maluku," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, no. 2, hal. 499–514, 2025.
- [12] Y. Z. N. Istiqomah dan G. N. Marpaung, "Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah," *Jesya*, vol. 9, no. 2, hal. 1213–1228, Jun. 2026.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v9i2.2755>
- [13] S. Zahir, "The impact of high population on economic development of Pakistan," *Journal of Poverty, Investment and Development*, vol. 8, no. 3, hal. 36–45, 2023. [Daring]. Tersedia pada: www.iprjb.org
- [14] A. Hafizrianda, "Potential prospects for population and infrastructure in 2045 on supporting development in Nduga Regency," *Journal of Community Development in Asia (JCDA)*, vol. 7, no. 1, hal. 121–131, 2024. <https://doi.org/10.32535/jcda.v7i1/2865>
- [15] R. Fitrianti, M. Zaenal, S. Fattah, dan N. Hidayah, "Flypaper effect: Analysis of financial transfers from the central to provincial regions in Indonesia," *Public and Municipal Finance*, vol. 14, no. 1, hal. 54–64, 2025. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.05](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05)
- [16] B. Siregar dan N. Pratiwi, "The effect of local government characteristics and financial independence on economic growth and Human Development Index in Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 19, no. 2, hal. 65–71, Sep. 2017.
<https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65-71>
- [17] M. N. Aziza, M. P. D. Syahputra, R. I. Febriyanti, dan V. A. Kirani, "Analisis pengaruh Dana Bagi Hasil, jumlah penduduk dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024," *Indonesian Journal of Economics*, vol. 2, no. 12, 2025.
- [18] L. Mukaromah *et al.*, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, vol. 13, no. 2, hal. 228–245, Sep. 2023.
<https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2874>
- [19] M. Reza *et al.*, "Analisis PDRB perkapita, investasi pemerintah, dan inflasi terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin," *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 6, no. 1, hal. 477–488, 2023.

- [20] R. P. Chaniago, M. Usman, dan P. Ananta, "Pengaruh institusi terhadap derajat desentralisasi fiskal di Indonesia," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, vol. 4, no. 6, hal. 1859–1866, Des. 2024. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i6.2344>
- [21] R. A. Syafri, E. Sofilda, dan A. Suparyati, "Determinan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, vol. 9, no. 4, hal. 277–290, 2024.
- [22] A. Mayraina dan N. Badriyah, "Analysis of the effect of economic growth and capital expenditures on regional financial independence in provinces on the island of Java," *Indonesian Economic Review*, vol. 5, no. 1, hal. 53–66, Feb. 2025. <https://doi.org/10.53787/iconew.v5i1.47>
- [23] I. Mudrosanto dan C. F. Ananda, "Factors affecting the fiscal independence of district city in East Java," *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, vol. 6, no. 1, hal. 25–35, Apr. 2020. [Daring]. Tersedia pada: <http://ijleg.ub.ac.id>
- [24] Rinaldi dan M. Nuryasman, "Pengaruh realisasi belanja modal, fiscal stress, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemandirian keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur)," *Jurnal Ekonomi*, vol. 18, no. 1, hal. 77–96, Mar. 2013.
- [25] R. Budiharjo, D. Pratomo, dan D. W. Hapsari, "Local government financial performance: Good governance, the effectiveness internal control and competence," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, vol. 10, no. 1, hal. 125–138, 2025. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.16916>
- [26] R. Nakatani, Q. Zhang, dan I. G. Valdes, "Fiscal decentralization improves social outcomes when countries have good governance," IMF Working Paper WP/22/127, International Monetary Fund, Washington, D.C., USA, 2022. <https://doi.org/10.5089/9798400211768.001>
- [27] C. Sukmadilaga, M. A. A. Pramanda, W. Yadiati, dan D. Yunita, "Factors that affect a better fiscally autonomous government: Evidence from an Indonesian newly autonomous region," *Edelweiss Applied Science and Technology*, vol. 8, no. 4, hal. 345–357, 2024. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i4.1021>
- [28] L. Yang, W. Hu, Z. Su, dan J. Qiao, "Impact of anti-corruption on the sustainability of local government debt in China: The moderating role of fiscal transparency," *Sustainability*, vol. 16, no. 21, Artikel ID 9507, Nov. 2024. <https://doi.org/10.3390/su16219507>
- [29] S. Nabila, S. Nurjanah, dan S. F. Zahra, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, vol. 2, no. 1, hal. 813–833, 2026. <https://doi.org/10.63822/1fv89v21>
- [30] R. Nurfadilah dan Fathihani, "Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR), Working Capital Turnover (WCT), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham," *Jurnal Ekonomika* 45, vol. 12, no. 2, 2025.
- [31] F. O. Ovenseri-Ogbomo dan P. I. Ajoonu, "Impact of exchange rate management on the Nigerian economic growth: Empirical validation," *American International Journal of Economics and Finance Research*, vol. 1, no. 2, hal. 28–35, Apr. 2019. <https://doi.org/10.46545/aijefr.v1i2.68>
- [32] A. B. Tulcanaza-Prieto, A. Cortez-Ordoñez, J. Rivera, dan C. W. Lee, "Is digital literacy a moderator variable in the relationship between financial literacy, financial inclusion, and financial well-being in the Ecuadorian context?," *Sustainability*, vol. 17, no. 6, Artikel ID 2476, Mar. 2025. <https://doi.org/10.3390/su17062476>
- [33] Fitriadi, Miar, dan A. Hokum, "The effect of allocation fund and regional revenue on fiscal independence: Evidence from Murung Raya," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 13, no. 6, hal. 1853–1864, Des. 2025. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4522>
- [34] K. Zakiah, "Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal daerah tahun 2016-2020," *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, vol. 7, no. 2, Des. 2022. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>
- [35] S. Sitaresmi dan H. Wahyudi, "Pengaruh SiLPA dan PAD terhadap serapan anggaran di Provinsi Lampung," *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, vol. 2, no. 1, hal. 29–44, Jul. 2022. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1428>
- [36] W. E. Oates, *Fiscal Federalism*. New York, NY, USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1972.

- [37] A. B. Ferdiansyah dan G. R. Febrianti, "Determinasi kemandirian fiskal daerah: Peran pajak daerah dan transfer pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, vol. 6, no. 2, Des. 2025. <https://doi.org/10.33105/jmp.v6i2.582>
- [38] W. Rahayu, A. S. Diyar, dan T. Priyatmo, "Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan Pemda di Provinsi Riau," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, vol. 5, hal. 38–56, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://jmp.kemenkeu.go.id>
- [39] W. E. Oates, "An essay on fiscal federalism," *Journal of Economic Literature*, vol. 37, no. 3, hal. 1120–1149, Sep. 1999. [Daring]. Tersedia pada: <https://about.jstor.org/terms>
- [40] F. Rahmadani, "Factors affecting regional financial independence in the Special Region of Yogyakarta," *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, vol. 5, no. 1, hal. 1468–1478, Jan. 2022. <https://doi.org/10.15294/efficient.v5i1.50786>
- [41] I. Rofiq dan F. I. Arza, "Pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, belanja pegawai dan leverage terhadap kemandirian keuangan daerah," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, vol. 3, no. 3, hal. 705–719, 2021.
- [42] A. R. Fauzi *et al.*, "Pengaruh kependudukan, perekonomian regional, dan pembangunan manusia terhadap lingkungan: Tantangan dan peluang bagi pembangunan kota berkelanjutan," *Diponegoro Journal of Economics*, vol. 14, no. 1, hal. 53–65, Apr. 2025. <https://doi.org/10.14710/djoe.50691>
- [43] M. W. Zafar, M. Shahbaz, F. Hou, dan A. Sinha, "From nonrenewable to renewable energy and its impact on economic growth: The role of research & development expenditures in Asia-Pacific Economic Cooperation countries," *Journal of Cleaner Production*, vol. 212, hal. 1166–1178, Mar. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.081>
- [44] E. Hartanto dan M. Adnan, "Evaluasi kebijakan KPK dalam pencegahan korupsi di Indonesia (Studi kasus: Program Monitoring Center for Prevention)," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol. 13, no. 3, hal. 1066–1092, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://fisip.undip.ac.id>